

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang terus berkembang, kompleksitas dan keragaman perilaku serta permasalahan sosial, terutama yang melibatkan kalangan remaja, semakin meningkat. Fenomena ini dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat pada zaman ini. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perilaku dan tindakan remaja, menciptakan berbagai pengaruh buruk yang memengaruhi mereka secara signifikan. Perkembangan teknologi memungkinkan remaja memiliki akses lebih luas dan mudah ke berbagai informasi serta konten di internet. Sayangnya, kemajuan ini juga membawa dampak negatif berupa eksposur yang lebih besar terhadap konten tidak sehat, yang dapat memengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku mereka. Selain faktor teknologi, masalah ekonomi turut menjadi tantangan yang dihadapi remaja.

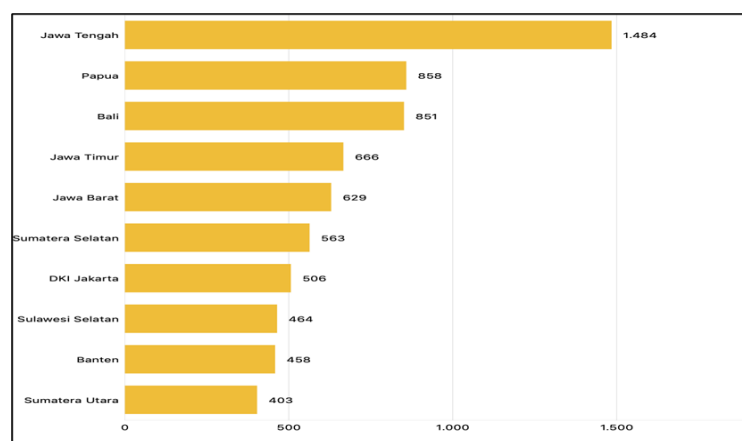
Pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang, di mana "bebas" diartikan sebagai tindakan yang melampaui batas nilai dan norma yang berlaku. Fenomena ini bersifat kompleks dengan akar permasalahan yang meluas serta melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pergaulan bebas tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Struktur sosial, kondisi ekonomi, serta nilai budaya dalam masyarakat turut berkontribusi terhadap munculnya fenomena ini. Faktor sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika pergaulan bebas (Kartono, 2017:6). Salah satu aspek

penting adalah nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi individu dalam menentukan tindakan serta keputusan mereka. Norma sosial membentuk standar perilaku yang diakui masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman moral serta etika dalam interaksi sosial. Selain itu, ekspektasi sosial turut memengaruhi perilaku individu dalam pergaulan bebas, terutama dalam adaptasi terhadap harapan dan penilaian masyarakat.

Dinamika sosial kelompok juga berkontribusi terhadap pola perilaku remaja. Dalam kelompok sosial, sering muncul rasa penasaran serta dorongan untuk mencoba berbagai aktivitas yang dilakukan oleh anggota kelompok lainnya. Interaksi dan pengaruh antarsesama dapat membentuk penilaian serta perilaku individu di dalam kelompok. Ketika anggota kelompok melihat teman sejawat melakukan kebiasaan positif, mereka cenderung terinspirasi dan termotivasi untuk meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang meniru perilaku negatif dari temannya, besar kemungkinan tindakan tersebut akan menyebar dan menjadi kebiasaan di kalangan anggota kelompok lainnya. Keputusan untuk mengikuti perilaku yang tidak etis dapat berdampak buruk pada dinamika kelompok secara keseluruhan, membentuk norma sosial yang tidak sehat, serta mengganggu kohesi kelompok. Aspek ekonomi juga memiliki dampak signifikan terhadap pergaulan bebas. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan ekonomi berpengaruh terhadap cara individu menjalani kehidupan sosial. Kondisi ekonomi yang buruk, seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial, dapat menimbulkan stres serta tekanan emosional, yang pada akhirnya memicu kecenderungan menuju pergaulan bebas. Selain faktor sosial dan ekonomi, aspek budaya turut berperan dalam membentuk perilaku remaja terkait pergaulan bebas.

Kurangnya pemahaman moral serta rendahnya tingkat ketaatan terhadap ajaran agama dapat memengaruhi pengambilan keputusan seseorang, yang pada akhirnya berdampak pada masa depannya. Nilai budaya dan tradisi membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik pergaulan bebas, sehingga persepsi terhadap fenomena ini dapat berbeda di setiap lingkungan sosial. Pergaulan bebas merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk memahami serta mengatasi fenomena ini, diperlukan analisis holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek secara komprehensif. Penanganan yang efektif harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai isu sosial yang semakin meluas, pergaulan bebas telah menjadi sorotan utama di era kontemporer. Implikasi dari fenomena ini menuntut respons serta tindakan yang terencana dari berbagai pihak. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas.

Gambar 1.1 Provinsi dengan pengidap HIV terbanyak



Sumber: Annur, 2023

Berdasarkan gambar I.1 Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian khusus dalam konteks penyakit AIDS pada tahun 2022, dengan catatan yang

mencatat jumlah pengidap tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Angka tersebut menunjukkan adanya 1.484 kasus AIDS yang tercatat, memperlihatkan proporsi yang cukup signifikan, yakni sekitar 14,98% di Jawa Tengah dari total kasus AIDS yang terjadi secara nasional pada tahun tersebut.

Gambar 1.2 Kasus HIV di Jawa Tengah

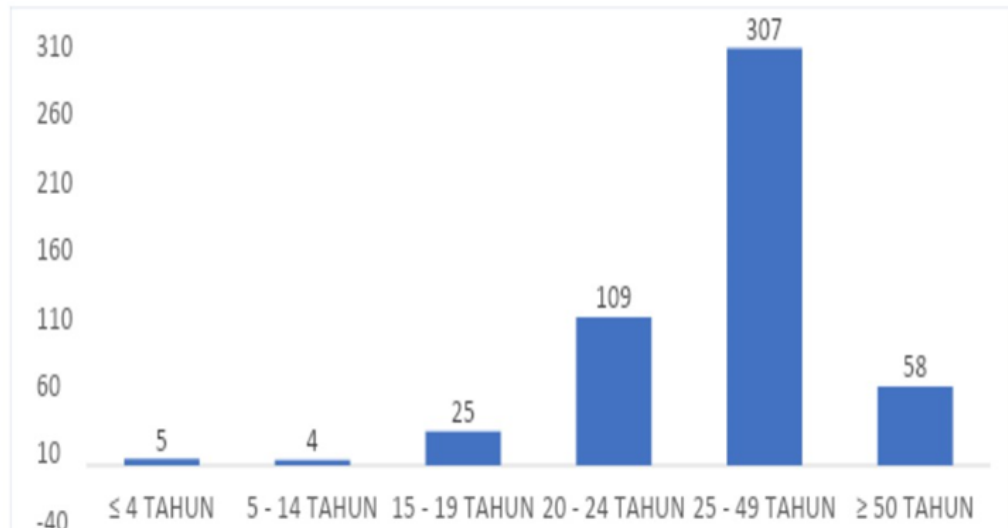
Kota / Kabupaten	Jumlah Kasus
Kota Semarang	239
Kabupaten Grobogan	117
Kabupaten Blora	113
Kabupaten Pemalang	106
Kabupaten Jepara	103
Kota Magelang	6
Kabupaten Pekalongan	12
Kabupaten Banjarnegara	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang 2022

Menurut informasi yang tercatat dalam Buku Saku Kesehatan Triwulan 3 Tahun 2022 dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah, pada periode kuartal III 2022, terdapat sebanyak 2.136 individu yang baru terdiagnosis mengidap virus HIV di wilayah Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.384 individu berjenis kelamin laki-laki dan 779 individu berjenis kelamin perempuan, yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus baru yang terdeteksi, Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah menduduki posisi teratas. jumlah penderita nya sebanyak 239 orang. Dari jumlah tersebut, 178 di antaranya adalah laki-laki dan 61 di antaranya adalah perempuan.

Kota Semarang, sebagai salah satu pusat pendidikan dan ekonomi di Jawa Tengah, tidak terkecuali dari dampak pergaulan bebas ini. Berbagai laporan dan statistik menunjukkan peningkatan kasus-kasus pergaulan bebas di kota ini, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mencakup kerusakan moral dan sosial. Pergaulan bebas, yang sering kali melibatkan perilaku seksual tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan narkoba, dan dampak serius yang dirasakan dari pergaulan bebas ini adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan remaja. Penyakit HIV, yang merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, merupakan salah satu penyakit yang menjadi fokus utama dalam bidang kesehatan. Sampai saat ini, belum ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan HIV.

**Gambar 1.3 Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Semarang
Tahun 2022**



Sumber: (Pustakadata Semarang Kota, 2022)

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik, jumlah kasus HIV tertinggi tercatat pada rentang usia 25 hingga 49 tahun, dengan jumlah mencapai 307 orang atau sekitar 60,4% dari total kasus yang dilaporkan. Sementara itu, kasus HIV juga ditemukan pada anak-anak berusia di bawah 4 tahun, dengan jumlah sebanyak 5 orang. Di sisi lain, kelompok usia dengan jumlah kasus terendah adalah usia 5 hingga 14 tahun, yang hanya tercatat sebanyak 4 orang atau sekitar 0,7% dari total kasus. Pola ini menunjukkan bahwa penyebaran kasus HIV cenderung lebih banyak terjadi pada kelompok usia produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif, terutama bagi kelompok usia yang memiliki risiko tinggi. Untuk menekan angka penyebaran HIV/AIDS, Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan berbagai program yang berfokus pada deteksi dini serta edukasi kepada masyarakat.

Sebagai langkah konkret dalam menangani penyebaran HIV/AIDS, Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan program *Voluntary Counseling and Testing* (VCT). Program ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan status HIV/AIDS secara sukarela dan gratis. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap tes HIV, tetapi juga memperoleh layanan konseling sebelum dan sesudah tes. Konseling ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hasil tes serta langkah-langkah yang perlu diambil setelahnya. Yang penting untuk diperhatikan, seluruh proses tes ini dilakukan secara rahasia. Hasilnya hanya akan diketahui oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan disebarluaskan tanpa izin. Meskipun program VCT telah berjalan, tantangan lain yang dihadapi adalah stigma terhadap penderita HIV/AIDS. Oleh karena itu, selain upaya pencegahan dan penanganan medis, edukasi masyarakat juga menjadi aspek yang sangat penting dalam menekan angka kasus HIV/AIDS.

Selain program pemeriksaan dan pencegahan, edukasi masyarakat tentang HIV/AIDS memiliki peran penting dalam mengurangi stigma sosial terhadap penderita. Pemahaman yang lebih baik dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat, seperti anggapan bahwa HIV hanya menular melalui kontak fisik biasa. Namun, pendidikan yang efektif harus lebih dari sekadar memberikan informasi. Program edukasi harus dirancang untuk membangun kesadaran, empati, dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan penderita HIV/AIDS. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah cara pandang mereka terhadap orang dengan HIV/AIDS. Pendidikan yang komprehensif dalam bidang

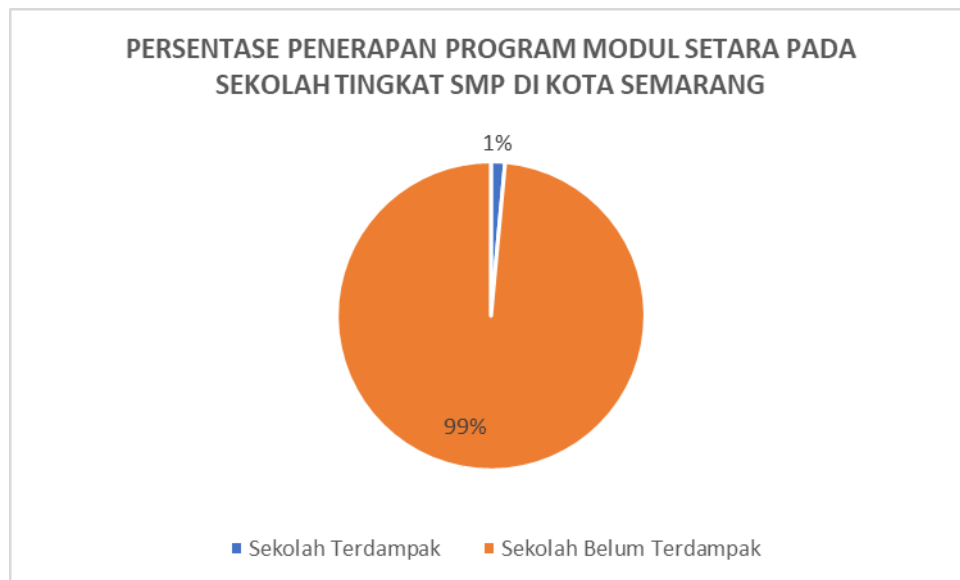
kesehatan reproduksi menjadi langkah strategis dalam upaya ini. Selain memberikan pemahaman tentang HIV/AIDS, pendidikan ini juga berperan dalam membentuk perilaku remaja yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pendidikan ini, Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus pada kesehatan reproduksi.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) untuk mengembangkan program sekolah percontohan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja secara lebih terstruktur dan efektif. PKBI, sebagai organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, berperan dalam penyusunan materi edukasi serta pelaksanaan program di sekolah-sekolah. Salah satu hasil dari kolaborasi ini adalah pengembangan Modul SETARA (Semangat Dunia Remaja), yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kesehatan reproduksi kepada para siswa.

1. Modul ini mencakup berbagai aspek penting, seperti
2. Pemahaman tentang organ reproduksi dan proses biologisnya.
3. Hak-hak siswa dalam menjaga kesehatan reproduksi.
4. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan risiko penyakit menular seksual.
5. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan dan masa depan remaja.

Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman nyata, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para siswa dalam memahami dan menerapkan konsep kesehatan reproduksi dalam kehidupan mereka. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan, tetapi juga pada metode pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik menjadi aspek penting dalam memastikan program ini berjalan secara efektif. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, para siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Remaja yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi akan mampu memberikan pengaruh positif kepada teman sebaya mereka. Melalui kombinasi pendidikan akademik dan pembentukan karakter, diharapkan para siswa tidak hanya memiliki pengetahuan yang memadai, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai langkah awal, program sekolah percontohan ini telah diterapkan di beberapa sekolah di Kota Semarang.

Gambar 1.4 Persentase Penerapan Program Modul SETARA pada Sekolah Tingkat SMP di Kota Semarang



Sumber: Data yang telah diolah penulis, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah terdapat 194 sekolah negeri dan swasta tingkat SMP akan tetapi untuk penerapan program SETARA baru dilaksanakan di 3 sekolah. Dimana hal tersebut menyatakan bahwa program ini baru diterapkan di 1% sekolah tingkat SMP di kota Semarang dan 99% atau sekitar 191 sekolah belum mendapatkan pemerataan program ini. Untuk meningkatkan pemerataan program ini perlu dilakukan kolaborasi yang lebih antara PKBI dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pada tahapan awal program ini tidak berjalan dengan mulus. PKBI harus membangun keyakinan dan banyak pihak yang harus diyakinkan untuk program inovatif ini. Keberhasilan meyakinkan pihak pihak terlibat seperti kepala sekolah dianggap sebagai langkah pertama, namun masih merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan upaya menggalang dukungan dari seluruh komponen

sekolah.. Pelaksanaan dari program ini melibatkan beberapa perdebatan dan tantangan. Banyak kekhawatiran muncul, terutama dari kalangan guru, yang merasa waspada bahwa materi ini dapat diartikan secara keliru oleh para siswa mereka. Oleh karena itu, PKBI merespons dengan mengadakan rangkaian Pelatihan Penggunaan Modul SETARA, Di mana guru-guru mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang materi ini dan mencapai konsensus bahwa Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum Bimbingan dan Konseling.

Penggabungan sumber daya dan keahlian antara PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan Dinas Pendidikan dianggap sebagai salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan serius yang berkaitan dengan perilaku bebas pada kalangan remaja. Dalam konteks penanganan pergaulan bebas, aspek sumber daya, baik yang bersifat finansial maupun tenaga kerja, seringkali menjadi hambatan utama. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat upaya-upaya pencegahan dan intervensi yang memadai, sehingga perlu adanya upaya sinergis untuk mengatasi kendala ini. Dengan melakukan penggabungan sumber daya dari PKBI dan Dinas Pendidikan, potensi pemanfaatan sumber daya ini menjadi lebih besar dan terarah.

Selain masalah sumber daya, aspek keahlian juga merupakan hal yang krusial dalam menghadapi pergaulan bebas. Kalangan guru, yang merasa waspada bahwa materi ini dapat diartikan secara keliru oleh para siswa mereka. Oleh karena itu, PKBI merespons dengan mengadakan rangkaian Pelatihan Penggunaan Modul SETARA, Di mana guru-guru mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang materi ini dan mencapai konsensus bahwa Integrasi materi

kesehatan reproduksi dalam kurikulum Bimbingan dan Konseling. adalah langkah yang sesuai. Pada bulan November 2016, nota kesepahaman untuk menguji coba pendidikan kesehatan reproduksi di tiga sekolah ini secara sah ditandatangani, menandai dimulainya fase implementasi yang sangat diantisipasi.

PKBI dan Dinas Pendidikan memiliki fokus keahlian yang berbeda, dimana PKBI memiliki keahlian terkait dengan aspek kesehatan reproduksi sementara Dinas Pendidikan memiliki keahlian terkait dengan pembelajaran dan pengembangan personal. Tak hanya itu, kolaborasi antara PKBI dan Dinas Pendidikan juga membuka peluang untuk memperluas cakupan program dan layanan yang ditawarkan. Dengan menggabungkan sumber daya dan jaringan dari kedua pihak, diharapkan upaya penanganan pergaulan bebas dapat menjangkau lebih banyak individu dan komunitas yang membutuhkan. Dengan demikian, kolaborasi ini bukan hanya tentang menggabungkan sumber daya, melainkan juga membuka jalan untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan positif dalam mengatasi pergaulan bebas, dan membentuk generasi muda yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan.

Maka dari itu pada penelitian ini akan berfokus pada Proses *collaborative governance* oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Program Modul SETARA. Selain itu pada penelitian ini juga akan berfokus untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat proses *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Program Modul SETARA.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Tingginya angka kasus HIV di kalangan remaja di Kota Semarang menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko.
- b. Kolaborasi antara PKBI dan Dinas Pendidikan Kota Semarang belum optimal dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, yaitu:

- a. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Program Modul SETARA?
- b. Apa saja faktor yang mendorong keberhasilan dan apa saja hambatan yang dihadapi dari proses *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui program Modul SETARA ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam Program SETARA (Semangat Dunia Remaja) oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari proses *collaborative governance* dalam Program SETARA (Semangat Dunia Remaja) oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini bertujuan agar pembaca diharapkan untuk dapat menambah *insight* baru baik pengetahuan maupun wawasan tentang dampak-dampak dari pergaulan bebas serta diharapkan pembaca agar memahami teori-teori mengenai kebijakan pendidikan, penelitian ini juga nantinya dapat digunakan sebagai wadah dan media guna mengembangkan pengetahuan serta menjadi bahan literatur guna menambah rencana baru bagi penyumbang akademis peneliti serta penelitian ini juga kedepannya dapat digunakan untuk bahan perbandingan penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Pada penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga instansi terkait :

1) Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis agar penulis bisa mengimplementasikan teori teori yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya, menambah insight dan pengalaman, dan menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang sama dengan judul penelitian yang diambil.

2) Bagi Pembaca

Manfaat praktis untuk pembaca adalah agar bertambahnya ilmu mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini, & dapat digunakan sebagai bahan refrensi apabila pembaca ingin meneliti topik ini lebih lanjut.

3) Bagi Instansi Terkait

Manfaat praktis bagi instansi terkait adalah diharapkan melalui penelitian ini instansi terkait dapat mengambil informasi yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya apabila ingin menerapkan kebijakan pendidikan ini lagi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN/ TAHUN JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Adilina, N., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang, serta mengetahui sejauh mana strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk mencapai Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.	Penelitian ini Menggunakan teori Kebijakan Publik menurut Thomas Dye, definisi kebijakan publik merupakan penentuan pemerintahan dalam melaksanakan suatu hal (<i>whater Goverments choose to do or not to do</i>). Kebijakan publik bisa disimpulkan bahwa jika pemerintahan menentukan untuk melaksanakan suatu tindakan, hal ini pasti memiliki tujuan dikarenakan kebijakan publik adalah perilaku pemerintahan. Jika pemerintah menentukan	Pada penelitian Ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i> . Adapun informan yang dipilih adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang (KPA), Puskesmas Bandarharjo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Orang dengan HIV/AIDS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang, yaitu promosi, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi sosial, dinilai sudah cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan implementasi program tersebut, yaitu kegiatan distribusi kondom yang belum maksimal, masih ada ODHA yang putus pengobatan, belum

			tidak melaksanakan suatu hal pun adalah kebijakan publik yang memiliki maksud dan tujuan.	(ODHA), dan Masyarakat Umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara menggunakan <i>interview guide</i> , dan dokumentasi.	semua pihak yang Terlibat memahami isi dari Perda, dan faktor pandemi Covid-19.
2.	Jacobi, C. A., Atanga, P. N., Bin, L. K., Fru, A. J., Eppel, G., Mbome, V. N., Etonde, H. E., Bogner, J. R., & Malfertheiner, P. (2020). "My friend with HIV remains a friend": HIV/AIDS stigma reduction Through education in secondary schools—a pilot project in Buea, Cameroon.	Penelitian ini bertujuan untuk melawan stigmatisasi HIV/AIDS melalui pendidikan siswa sekolah menengah di Kamerun, dengan menggunakan pendekatan inovatif: Secara terbuka, guru yang mengidap HIV menggunakan hasil kuesioner stigma UNAIDS kami sebagai dasar pengajaran mereka dan dikombinasikan dengan materi dari Pusat Penelitian Perempuan Internasional (ICRW).	Penelitian ini menggunakan teori teori yang digunakan termasuk teori perilaku, teori ini digunakan untuk memahami perilaku individu terkait dengan HIV/AIDS, seperti perilaku seksual, penggunaan kondom, perilaku tes HIV, dan penerimaan terhadap layanan pengobatan. Selain itu, juga digunakan teori tentang stigma internal yang dialami oleh ODHA dan upaya untuk mengatasi stigma tersebut.	Penelitian ini menggunakan metode wawancara 200 ODHIV yang dipilih secara acak dari pusat pengobatan HIV/AIDS di Rumah Sakit Daerah Annex Buea. Wawancara ini dilakukan oleh guru kami yang secara terbuka mengidap HIV-positif. 20 Sejalan dengan kegiatan ini, para siswa dari Sekolah Tes diajar tentang berbagai aspek tentang HIV dan AIDS serta stigmatisasi yang kami lakukan selama 2 bulan (PNA dan VNM) melalui ceramah. - presentasi "power point" bergaya. Berdasarkan hasil "Indeks Stigma HIV"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Empat puluh persen ODHA tidak mengetahui alasan mengapa mereka didiskriminasi, 25% mengatakan bahwa mengidap HIV adalah hal yang memalukan, dan 20% percaya bahwa orang takut tertular HIV. Stigma internal juga dianggap sebagai faktor utama lainnya, karena hampir separuh ODHA yang diwawancarai merasa malu dan bersalah.

				dan isi “Toolkit for Action” dari ICRW,21 kami merancang kurikulum yang terdiri dari kerja kelompok kecil, drama, menggambar dan visualisasi Kelompok diskusi, dan sebagainya. (Gambar 1A) untuk siswa. Sebelum dan Sesudah intervensi ini, siswa menjalani tes “Benar/Salah” mengenai HIV, AIDS, dan stigma untuk mengukur potensi keberhasilannya (lihat materi tambahan).	
3.	He, J., Wang, Y., Du, Z., Liao, J., He, N., & Hao, Y. (2020). Peer education for HIV prevention among high-risk groups: a systematic review and meta analysis. BMC infectious diseases, 20, 1-20.	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pendidikan sebaya dalam mengurangi risiko penularan HIV di kalangan kelompok berisiko tinggi, seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, transgender, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.	Penelitian ini menggunakan Teori Proses Perubahan Perilaku Transteoretis. Teori ini digunakan untuk memahami dan menganalisis perubahan perilaku, termasuk dalam hal penggunaan kondom, tes HIV, dan hubungan seks tanpa kondom	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan sistematis dan meta-analisis . Tinjauan Sistematis adalah pendekatan penelitian yang menyelidiki, mengumpulkan, dan mensintesis semua bukti yang relevan dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan	Hasil dari penelitian Tersebut menunjukkan bahwa intervensi pendidikan sebaya efektif dalam mengurangi risiko penularan HIV di kalangan kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, transgender, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi berbasis teman sebaya dapat meningkatkan penggunaan kondom,

		Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi berbasis teman sebaya dalam meningkatkan penggunaan kondom, melakukan tes HIV, dan mengubah perilaku seksual yang berisiko. Selain itu, penelitian juga mencari bukti bahwa intervensi pendidikan sebaya dapat menjadi strategi efektif dalam pencegahan HIV di kalangan populasi yang rentan.		penelitian yang spesifik. Sementara itu, meta-analisis adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggabungkan dan menganalisis hasil dari beberapa studi yang berbeda untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan umum	melakukan tes HIV, dan mengurangi perilaku seks tanpa kondom di antara kelompok berisiko tinggi. Studi-studi ini memberikan bukti bahwa intervensi pendidikan sebaya dapat menjadi strategi yang efektif dalam pencegahan HIV di kalangan populasi yang rentan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi pendidikan sebaya dapat mempengaruhi perilaku penggunaan kondom dan tes HIV, dengan efek yang signifikan setelah intervensi yang berkelanjutan.
4.	Tilano, Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri, 2019, “<i>Collaborative governance</i> Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang”	Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam konteks keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan, serta menganalisis elemen-elemen yang mendorong dan menghambat Kerjasama tersebut.	Dalam penelitian ini, digunakan teori tentang <i>Collaborative governance</i> yang meliputi model Ansell and Gash serta De Seve. Menurut teori Ansell and Gash, terdapat lima elemen kunci, yaitu Kondisi awal, Kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi, dan hasil (outcome).	Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sejumlah teknik pengumpulan data digunakan, termasuk wawancara, review literatur, pengamatan, dan dokumentasi.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di dalam penyelenggaraan keselamatan angkutan jalan dan lalu lintas di wilayah Kota Semarang, <i>collaborative governance</i> telah berjalan dengan baik jika dilihat dari kondisi awal, desain institusional, dan proses kolaboratif. Namun, dalam praktiknya, kepemimpinan fasilitatif belum sepenuhnya optimal.

5.	Yahya, Hilmy, dan Sudarmo, 2022, Collaborative Governance dalam Program "EPPSON" Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 2(1), 239- 253.	Memberikan gambaran terperinci tentang <i>collaborative governance</i> BUM Desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Sugihwaras, Kabupaten Sidoarjo.	Penelitian ini mengadopsi teori Sukses <i>collaborative governance</i> menurut Goldsmith dan Kettl (2009). Teori ini mengidentifikasi 8 kriteria utama keberhasilan <i>collaborative governance</i> , termasuk struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan di antara peserta, tata kelola, akses ke otoritas, akuntabilitas/distribusi tanggung jawab, pertukaran informasi, serta akses ke sumber daya.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam metodologi penelitiannya. Penentuan informan dilakukan dengan memanfaatkan Teknik purposive sampling dan snowball sampling, sementara untuk mengumpulkan data, digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi	Indikator yang belum berhasil diimplementasikan dengan baik mencakup struktur jaringan, tata kelola, akses ke wewenang, akuntabilitas/distribusi tanggung jawab, serta akses ke sumber daya. Salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di sugihwaras adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUM Desa "Sukses Bersama". Diperlukan pelatihan strategi pemasaran untuk meningkatkan promosi produk-produk yang dimiliki BUM Desa "Sukses Bersama" sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa Sugihwaras di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
6.	Sabaruddin, Abdul., Achmad, Lamo, Said. (2018). <i>Collaborative governance</i> in Household Handling.	Untuk mengkaji dan menganalisis proses <i>Collaborative governance</i> sebagai dasar terbentuknya	Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash (2007). Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai serangkaian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan yang dikenal dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara

		kolaborasi dan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi <i>Collaborative governance</i> dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni.	pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan nonnegara dalam proses pengambilan kebijakan yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan	nama penelitian tindakan partisipatif (PAR). Pada dasarnya PAR merupakan penelitian yang secara aktif melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) dalam menilai tindakan atau interaksi antar organisasi guna melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.	dilakukan melalui mekanisme formal dan informal, antara lain (1) dialog antar aktor: tahap dialog formal dan informal antar aktor. Secara formal, dialog dilakukan melalui forum bersama dengan membentuk kawasan perumahan dan permukiman (POKJA PKP). Meskipun tidak secara formal perencanaan dan pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni mengedepankan musyawarah. (2) membangun konsensus: para pelaku yang terlibat mempunyai tanggung jawab yang telah diputuskan bersama. Selanjutnya pemerintah daerah menyiapkan anggaran melalui APBD dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai pelaksana dan penanggung jawab program. Pemerintah desa/kelurahan turut terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi rumah yang tidak layak huni. Pihak swasta terlibat dalam menyediakan bahan bangunan, sementara partisipasi masyarakat dapat
--	--	--	---	---	--

					berupa kesediaan untuk menjadi tenaga kerja dan kesiapan dalam menyediakan bahan. Pada tahap ini, pentingnya komitmen terhadap tujuan terlihat dari pengakuan aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi, yang sepakat untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah.
7.	Fajrina, Amaliana Nur, et al. (2023). <i>Collaborative governance of larvatus 1787</i>) in Kuala Regency, Indonesia, Narsalis (Wurmb, conservation Barito Ecological Questions, 34(1), 1- 17.	Untuk Mendeskripsikan proses tata Kelola kolaboratif yang dilakukan pada konservasi Bekantan di Pulau Curiak	Penelitian ini menggunakan teori prinsip kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson, dkk. (2012) dan Bianchi, dkk. (2021), yang menyatakan bahwa	Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, pengamatan, dan telaah literatur pada beberapa jurnal terpercaya. terdapat 3 prinsip dasar kolaborasi yang didasarkan pada kebijakan atau program, yaitu prinsip umum (kesamaan visi, misi, dan tujuan), berbagi motivasi, dan kapasitas aksi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara membentuk lembaga tata kelola kolaboratif untuk memperbaiki situasi yang sudah buruk, dibandingkan Melakukan pengelolaan Bersama penyediaan air dan jasa ekosistem lainnya.
8.	Sulistyaningsih, Tri., etc. (2019). The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in	Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan model <i>Collaborative governance</i> dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh	Penelitian ini menggunakan teori Healey, Elwood, dkk. Healey, Elwood, dkk menyatakan bahwa Melalui perubahan terkini dalam praktik tata kelola kota, warga dan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan catatan lapangan yang kemudian direduksi, dideskripsikan,	Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) belum menunjukkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

	Pasuruan, Indonesia	(KOTAKU).	organisasi masyarakat memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk perencanaan dan penyediaan layanan ditingkat lokal.	dianalisis, dan diinterpretasikan.	Implementasi Program KOTAKU belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan keberadaan permukiman kumuh perkotaan yang cenderung meningkat.
9.	Kurniawan, H., & Putra, D. T. (2021). Collaborative governance Dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di kota tanjungpinang. Jurnal Widyaaiswara Indonesia, 2(1), 11–20. https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.69	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan Waduk Sei Pulai mengacu pada proses kolaborasi menurut Vigoda	Menurut Vigoda (2002), proses ini dapat menggambarkan apa yang dilakukan pemerintah dan stakeholders dalam konteks berkolaborasi	Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian kualitatifnya penulis memilih tipe fenomenologi untuk mengungkap secara mendalam tentang proses <i>collaborative governance</i> yang dilakukan stakeholders ber kaitan pengelolaan sumber daya air Waduk Sei Pulai	Berdasarkan proses <i>collaborative governance</i> yang dilakukan dalam pengelolaan waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang terlihat bahwa Pemerintah Pusat membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau (TKPSDA WS Kepri). Terdapat 24 (dua puluh empat) anggota dalam proses <i>collaborative</i> yang dilakukan dan membutuhkan SOP dalam menguatkan hubungan yang telah dibangun. Adapun stakeholders yang paling berpengaruh dalam <i>collaborative governance</i> terhadap pengelolaan waduk Sei Pulai adalah dari unsur pemerintah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pekerjaan Umum,

					Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV.
10.	Eberhard, Rachel, et al., (2017) “ <i>The Practice of Water Policy Governance Networks: An International Comparative Case Study Analysis, Society & Natural Resource</i> , 30(4), 453-470.”	Mengeksplorasi praktik dan dinamika kekuasaan jaringan kebijakan air dalam enam studi kasus longitudinal yang signifikan di Australia, Amerika Serikat, dan Perancis.	Penelitian ini menggunakan teori tata kelola jaringan yang dikemukakan oleh Provan dan Kenis (2007), yang menyatakan bahwa model tata kelola jaringan idealnya memiliki 3 unsur, yaitu otoritas pengambilan keputusan, musyawarah, dan akuntabilitas.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis studi kasus komparatif untuk menyelidiki penelitian tata kelola air yang ada di Australia (Murray–Darling Basin and Reef Partnership), Amerika Serikat (CALFED dan Everglades), dan Perancis (Loire dan Rhone), Sehingga memungkinkan adanya persamaan dan perbedaan di antara keduanya.	Upaya untuk menggunakan pendekatan jaringan tata kelola untuk mengatasi konflik kebijakan air tidak mampu secara efektif menjembatani fungsi hierarki dan wewenang pemerintah dengan potensi hubungan jaringan yang produktif dan kreatif. Bagi para praktisi, penelitian ini menekankan perlunya mengelola siklus perubahan dan gangguan yang sedang berlangsung secara efektif, serta memperhatikan kekuasaan dan politik. Ketika skala konflik air dan sumber daya lainnya terus meningkat, kebutuhan untuk lebih memahami dan meningkatkan kapasitas kelembagaan semakin meningkat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa teori yang di gunakan sangat bermacam-macam yang

menggambarkan berbagai upaya dalam implementasi kebijakan terkait HIV/AIDS dan pengelolaan sumber daya air, dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Misalnya, penelitian Adilina, N., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (n.d.) bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Mereka menemukan bahwa implementasi program telah mengalami beberapa hambatan, seperti distribusi kondom yang belum maksimal, Salah satu upaya kunci dalam penanganan HIV/AIDS adalah melalui pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh Jacobi et al. (2020) dalam penelitiannya tentang pengurangan stigmatisasi HIV/AIDS melalui pendidikan di sekolah menengah di Kamerun. Mereka menemukan bahwa intervensi pendidikan sebaya dapat mengurangi stigma terhadap HIV/AIDS dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang kondom dan tes HIV.

Penggunaan *collaborative governance* juga telah diamati dalam konteks pengelolaan sumber daya air, seperti dalam penelitian oleh Eberhard et al. (2017) tentang praktik kebijakan air di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa pendekatan jaringan tata kelola dapat membantu mengatasi konflik kebijakan air, meskipun masih ada tantangan dalam mengelola perubahan dan gangguan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penelitian tentang *collaborative governance* antara PKBI Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah untuk mengatasi kasus pergaulan bebas, yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV, bisa memanfaatkan temuan dari penelitian terdahulu ini.

Pihak terkait dapat mengadopsi praktik-praktik yang berhasil dalam implementasi kebijakan terkait HIV/AIDS. serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Pada Penelitian ini,

peneliti akan menganalisis bentuk dan dampak dari Implementasi *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah melalui Program Sekolah Percontohan.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Pasolong (dalam Revida, 2020: 3), administrasi publik dapat didefinisikan sebagai wujud kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang ataupun suatu instansi yang mempunyai orientasi dalam menyelesaikan beragam tugas pemerintahan guna pemenuhan kebutuhan politik dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, menurut Nawawi (dalam Ardani, 2019: 25), administrasi adalah kegiatan untuk memberikan pelayanan dengan mengurus informasi, materi, dan manusia guna mencapai sesuatu yang sudah diorientasikan. Deskripsi ruang lingkup administrasi publik yang diuraikan dalam karya ilmiah yang disajikan oleh Nicholas Henry (sebagaimana dikutip dalam Keban, 2014: 8— 9) adalah sebagai berikut: Organisasi publik meliputi prinsip-prinsip yang terkait dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

- Manajemen publik mencakup aspek sistem dan disiplin manajemen, manajemen sumber daya manusia, produktivitas, anggaran publik, dan evaluasi program.
- Implementasi melibatkan pendekatan terhadap kebijakan publik dan pelaksanaannya, privatisasi, administrasi antarpemerintah, dan etika birokrasi.

Administrasi publik mempunyai peran yang dijelaskan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (dalam Keban, 2014: 16), yakni menyusun berbagai kebijakan dan program supaya dapat melaksanakan pemenuhan

ekspektasi publik serta meraih tujuan negara secara tepat yang berkeadilan sosial, mempunyai peran untuk memudahkan masyarakat dan berasaskan demokrasi. Selain itu, pelaksanaan administrasi publik pun mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan publik agar berkualitas bagi masyarakat. Menurut kutipan Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 2), Amy Dunsire menyajikan variasi definisi administrasi, di mana administrasi diartikan sebagai tindakan pengarah, penciptaan peraturan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Mencakup kegiatan analisis, pemeliharaan konsistensi, penyediaan pandangan untuk keputusan, peninjauan kebijakan, dan produksi barang dan jasa publik baik secara individu maupun kolektif, serta sebagai lingkup kerja akademik.

Sementara itu, berdasarkan Trecker yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014: 2), administrasi adalah suatu proses dinamis yang berkelanjutan, diarahkan pada pencapaian tujuan melalui pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan materi, dengan kerja sama dan koordinasi. Tugas administrasi meliputi pengembangan program pelayanan, interpretasi dan implementasi tujuan organisasi sebagai persyaratan program pelayanan, dan penggunaan kepemimpinan yang sesuai dalam proses perubahan organisasi pelayanan manusia.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Etimologi, asal mula kata dan makna dari administrasi, berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu "ad" yang berarti melayani atau memenuhi, dan "ministrate" yang berarti kebutuhan. Administrasi publik merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh sejumlah individu atau lebih dalam konteks kerja publik. Hal ini mencakup tiga aspek penting, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Administrasi publik memiliki tujuan menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Paradigma adalah suatu konsep yang digunakan oleh ahli untuk memahami perkembangan berbagai ilmu dan perspektif ilmu pengetahuan serta menganalisis peristiwa yang sedang berkembang di masyarakat. Penelitian ini mencermati enam paradigma administrasi publik yang memiliki pengaruh signifikan:

- Paradigma Pertama (1900-1926): Dikenal dengan Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi atau teori klasik, menekankan kewajiban politik terhadap kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Administrasi bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah terbagi menjadi tiga bagian utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Paradigma Kedua (1927-1937): Lebih dikenal sebagai Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Paradigma ini memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen yang dicetuskan oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick.
- Paradigma Ketiga (1950-1970): Dikenal sebagai Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini menekankan peran birokrasi pemerintah dan sifat abstrak administrasi publik sebagai ilmu politik.
- Paradigma Keempat (1956-1970): Menggambarkan Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini fokus pada beberapa ilmu, seperti analisis manajemen, pengimplementasian teknologi modern (metode kuantitatif, analisis sistem, riset, dan lain-lain), serta perilaku organisasi.
- Paradigma Kelima (1970-Sekarang): Mendefinisikan Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Fokus paradigma ini adalah pada teori organisasi, manajemen, kebijakan publik, serta masalah-masalah dan

kepentingan publik.

- Paradigma Keenam (1990-Sekarang): Dikenal dengan sebutan Paradigma Governance. Paradigma ini merupakan yang terbaru dan muncul sejak tahun 1990 hingga saat ini. Fokus paradigma ini adalah mengubah kinerja pegawai sektor publik dengan peralihan dari government ke governance. Hal ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai good governance.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah ilmu yang dapat dikatakan baru secara sejarah, awalnya kebijakan publik ini muncul sekitar dasawarsa tahun 1960-an, dimana kebijakan publik ini selaku sebuah ilmu yang merujuk pada cakupan public administration (administrasi publik) dan juga political science (ilmu politik). Dengan itu, perkembangan terkait dengan teori kebijakan publik ini memberikan dampak pada konsep perkembangan melalui gagasan terkait dengan cara pemerintah dalam melakukan perencanaan, perancangan, penerapan, dan pengevaluasian terhadap kebijakan publik. Berbicara mengenai kebijakan publik, kebijakan publik itu sendiri merupakan “whatever choose to do or not to do” yang berarti apapun yang jadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (Thomas R. Dye, 1981) menjelaskan jumlah kegiatan pemerintah, baik yang bertindak secara langsung maupun melalui agen-agen terkait, sebagai yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara (Peters, B. Guy, 2015).

Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang direncanakan dengan berbagai tujuan, praktik, dan nilai-nilai tertentu (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 1995). Dengan begitu, apapun perbuatan yang

dilakukan oleh pemerintah baik secara tersurat maupun tersirat dapat dikatakan sebagai kebijakan, perbuatan tersebut berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Thomas R. Dye, 1981 ; Peterson, Steven A., 2003). Maka dari itu, teori kebijakan publik berbicara mengenai perbuatan yang mau dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah (Thomas R. Dye, 1981), yang dimana perbuatan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat (Peters, B. Guy, 2015), dan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai, dan praktik yang sebelumnya sudah ditentukan (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 1995).

Dalam konteks penelitian *collaborative governance* antara PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, kebijakan publik berperan sebagai kerangka kerja yang mendasari kolaborasi tersebut. *Collaborative governance* mengacu pada proses dimana berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, bekerja bersama untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Dalam penelitian ini, kebijakan publik tentang pendidikan dan kesehatan reproduksi diimplementasikan melalui kerja sama antara PKBI dan Dinas Pendidikan.

1.6.5 Manajemen Publik

Secara etimologi, istilah "manajemen publik" dapat dipisahkan menjadi dua kata utama, yaitu "manajemen" dan "publik." Menurut Stoner (1982:4), manajemen diartikan sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian terhadap upaya anggota organisasi dan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen adalah proses yang menyeluruh dalam mengelola organisasi, mulai dari merancang

rencana, mengatur struktur, mengendalikan operasional, hingga mengoptimalkan sumber daya organisasi lainnya. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen publik sendiri merupakan kajian yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa secara akademis, manajemen publik mendapatkan pengaruh dari bidang ilmu seperti manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik, dan sebagainya.

Dalam sudut pandang berbeda, Vigoda (dalam Sampara, 2000:81) merumuskan tujuh prinsip utama dalam doktrin *New Public Management*. Pertama, penerapan manajemen profesional di sektor publik. Kedua, penggunaan indikator kinerja. Ketiga, fokus yang lebih besar pada pengendalian hasil kerja. Keempat, perhatian yang bergeser ke unit-unit yang lebih kecil. Kelima, peningkatan persaingan. Keenam, penerapan gaya manajemen yang terinspirasi dari sektor swasta. Ketujuh, penekanan pada disiplin dan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Dalam konteks program modul SETARA yang diimplementasikan oleh PKBI Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menangani isu pergaulan bebas, prinsip-prinsip *New Public Management* dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi komprehensif kepada remaja, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, serta dampak negatif dari pergaulan bebas.

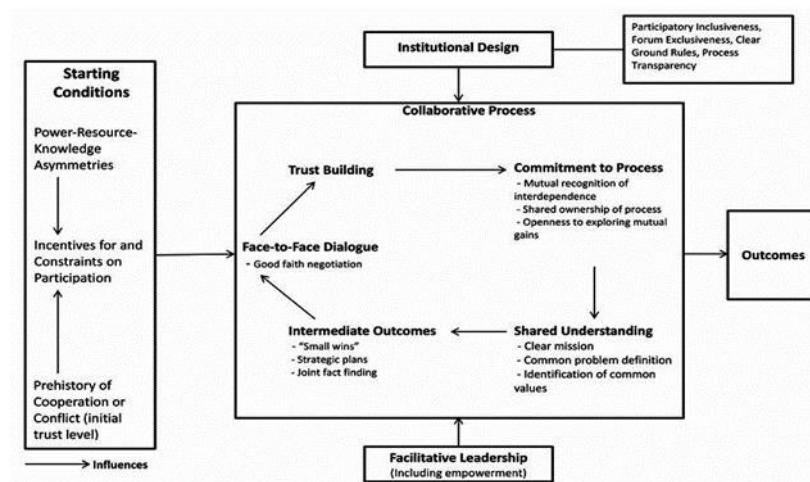
Dengan memanfaatkan indikator kinerja, program SETARA dapat

mengevaluasi sejauh mana modul ini berhasil meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku positif di kalangan remaja. Selain itu, pendekatan yang fokus pada unit-unit kecil, seperti kelompok diskusi siswa, memungkinkan materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi antara PKBI Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mencerminkan pemanfaatan sumber daya lintas sektor, yang memperkuat efisiensi dan cakupan program. Dengan gaya manajemen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, program ini diharapkan mampu memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pergaulan bebas di kalangan remaja, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan mendukung.

1.6.6 Collaborative governance

Menurut Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* merupakan pengelolaan dari pemerintah yang melibatkan pihak terkait yang menitikberatkan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya bertujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan segala kebijakan publik maupun program – program publik. *collaborative governance* ini lebih berfokus pada kebijakan publik dan masalah publik. Dimana suatu Institusi publik akan selalu menitikberatkan dalam proses pembuatan kebijakan, pembuatan tujuan serta dalam proses kolaborasi demi tercapainya derajat konsensus diantara pihak yang terlibat.

Gambar 1.5 *The Collaborative Governance Model*



Sumber: Ansell & Gash, 2008

Menurut Ansell dan Gash (2008) mereka merumuskan model tata kelola kolaboratif berdasarkan telaah literatur. Hasil dan simpulan dari telaah tersebut direpresentasikan melalui empat variabel utama, yakni: (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan, dan (4) proses kolaboratif.

1. Kondisi awal (*Starting Conditions*)

Kondisi di awal yang mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, serta antara lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat tiga variabel besar dalam kondisi awal ini, yaitu: ketidakseimbangan dalam pengaruh/kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pemangku kepentingan seperti sejarah masa lalu yang meliputi kerja sama sebelumnya atau konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan serta bentuk dorongan dan hambatan dalam berpartisipasi dalam proses kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mengacu pada cara aturan dasar kolaborasi dibuat. Ini penting karena memberikan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan menekankan aturan partisipasi dalam kolaborasi, pembentukan forum, aturan pelaksanaan yang jelas, serta transparansi dalam proses kolaborasi.

3. Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*)

Dalam kolaborasi, sering kali terjadi konflik atau perselisihan yang tinggi dan ketidakpercayaan antara pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, biasanya ada keinginan besar dari para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang diterima dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, yang dapat diandalkan sebagai mediator dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat, yang dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Terdapat lima proses di dalam proses kolaboratif yaitu :

1) Dialog Tatap Muka

Semua tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan "dialog antara pemangku kepentingan". Dialog ini adalah proses yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Dialog ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi peluang dengan menekankan bahwa kolaborasi akan menghasilkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari dialog. Pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Proses ini memakan waktu lama dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

3) Komitmen terhadap Proses

Tingginya saling ketergantungan di antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen untuk proses berkolaborasi. Kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali, melainkan proses kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4) Pemahaman Bersama

Pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai. Ini termasuk tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi, dan nilai-nilai yang akan dicapai melalui kolaborasi.

5) Hasil Sementara

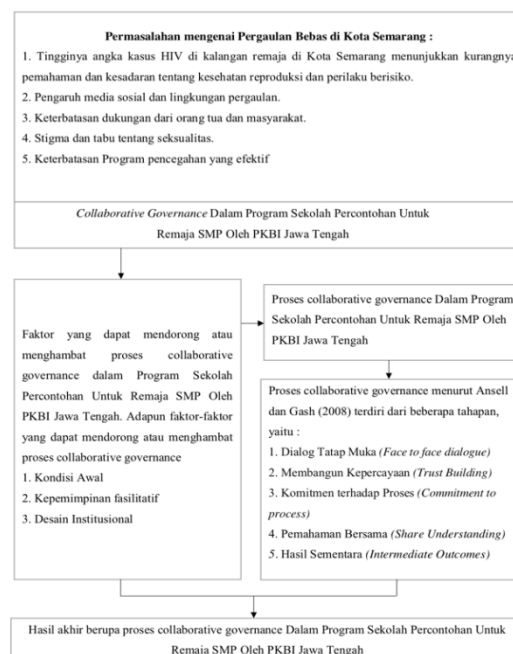
Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi dapat dirasakan, meskipun kecil. Hasil kecil ini dapat mendorong kepercayaan dan komitmen di antara pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, lembaga non-profit yaitu PKBI dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah akan melakukan kolaborasi dalam merancang dan menjalankan program pendidikan seperti Modul SETARA (Semangat Dunia Remaja) untuk menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswa. Ini menunjukkan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan non-profit dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan model *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008).

Model *Collaborative governance* menyoroti penting nya dampak kolaborasi antara PKBI dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dalam merancang dan menjalankan program pendidikan. Ini termasuk menganalisis dampak positif dari kerjasama tersebut, seperti peningkatan akses pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa lalu model ini juga menyoroti pentingnya proses kolaboratif yang melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil antara. Dalam penelitian ini , dapat menganalisis bagaimana kedua lembaga tersebut mengadopsi dan mengimplementasikan proses-proses ini dalam merancang dan menjalankan program pendidikan bersama.

1.6.7 Kerangka Teoritis

Gambar 1.6 Kerangka Teoritis



Sumber: Data yang telah diolah penulis, 2025

Pemahaman bersama, dan hasil antara. Dalam penelitian ini, dapat menganalisis bagaimana kedua lembaga tersebut mengadopsi dan mengimplementasikan proses-proses ini dalam merancang dan menjalankan program pendidikan bersama.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Bentuk Proses *Collaborative governance* dalam Program SETARA (Semangat Dunia Remaja) untuk Siswa SMP oleh PKBI Jawa Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk proses serta faktor pendorong dan penghambat dari *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program SETARA oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah **dan** Dinas Pendidikan Kota Semarang. Program SETARA difokuskan pada pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa SMP sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas dan risiko kesehatan seksual di kalangan remaja.

Berdasarkan teori efektivitas *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk kerja sama antara PKBI dan Dinas Pendidikan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Program SETARA. Adapun tahapan *collaborative governance* dalam program ini dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1.1 Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

- Bentuk komunikasi yang terjalin antara PKBI, Dinas Pendidikan, dan sekolah.
- Kesempatan semua pihak dalam menyampaikan pendapat mereka.
- Cara menangani perbedaan pendapat selama rapat koordinasi.
- Kendala dalam proses dialog yang menghambat efektivitas program.

1.7.1.2 Membangun Kepercayaan (*Building Trust*)

- Pendekatan khusus yang dilakukan untuk membangun kepercayaan antar stakeholders.
- Distribusi tanggung jawab dalam program.
- Kendala dalam membangun kepercayaan serta langkah mitigasi yang dilakukan.

1.7.1.3 Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

- Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dalam pelaksanaan program.
- Bentuk nyata dari komitmen dalam program ini.
- Tantangan dalam membangun dan mempertahankan komitmen antar stakeholders.

1.7.1.4 Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

- Apakah tujuan bersama telah dibahas dan disepakati sejak awal kolaborasi?
- Proses berbagi pemahaman antar stakeholders dalam program.

- Upaya menjaga kesepahaman untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa menghambat program.

1.7.1.5 Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

- Contoh dari hasil sementara yang telah dicapai selama pelaksanaan program.
- Bagaimana hasil ini memberikan gambaran awal efektivitas program.

1.7.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dari proses *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Program SETARA

Faktor keberhasilan dari Proses *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Program SETARA dapat diidentifikasi berdasarkan faktor pendorong serta faktor penghambat, yaitu:

1.7.2.1 Faktor Pendorong

1. Komitmen dan Kepercayaan Antar Pemangku Kepentingan

- Kesepahaman antara PKBI, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung program.
- Kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran remaja.

2. Kepemimpinan yang Visioner

- Peran kepala sekolah dalam memastikan program tetap berjalan dan mendapatkan dukungan penuh.

3. Komunikasi yang Efektif

- Rapat koordinasi berkala antara stakeholders untuk memastikan efektivitas program.

4. Kesamaan Visi dan Tujuan

- Pemahaman yang selaras antara semua pihak bahwa pendidikan kesehatan reproduksi remaja sangat penting.

5. Dukungan Teknologi

- Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi kepada siswa.

1.7.2.2 Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran

- Alokasi dana yang terbatas untuk pelaksanaan program, menyebabkan keterbatasan modul dan tenaga pelatih.
- Terbatasnya jumlah fasilitator yang bisa melatih sekolah-sekolah yang ingin mengimplementasikan Program SETARA.

2. Kurangnya Kesiapan Sekolah

- Tidak semua sekolah memiliki tenaga pengajar yang siap menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi.

3. Birokrasi yang Kompleks

- Proses administrasi dalam penyediaan modul dan pelaksanaan pelatihan yang lambat karena regulasi birokrasi.

4. Pergantian Kepemimpinan di Sekolah

- Kepala sekolah yang baru sering kali memiliki kebijakan berbeda, sehingga program harus dijelaskan ulang dan berpotensi terhenti.

1.8 Argumen Penelitian

Collaborative governance memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi ini, berbagai perspektif dan sumber daya dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif, program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dapat dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, memastikan bahwa intervensi yang diimplementasikan memiliki dampak jangka panjang, namun karena penanganan pergaulan bebas adalah masalah yang kompleks dan berkelanjutan, penelitian ini mungkin sulit untuk mengevaluasi atau merekomendasikan solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama jika tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan penerapan berkelanjutan dari intervensi yang diusulkan.

Dengan *collaborative governance*, berbagai daerah dan sektor dapat saling berbagi informasi dan pengalaman, memungkinkan penyesuaian intervensi yang sesuai dengan konteks lokal namun tetap memiliki relevansi nasional. Kolaborasi antar wilayah dan sektor memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya

relevan untuk satu daerah tertentu, tetapi juga dapat diaplikasikan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan di daerah lain. namun, masalah pergaulan bebas (seperti perilaku remaja yang berisiko) bukanlah masalah sederhana dan cara mengatasinya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan kebijakan lokal bisa membuat permasalahan ini terlihat berbeda di berbagai tempat. Jika penelitian hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan hanya melibatkan Dinas Pendidikan di wilayah tersebut, hasilnya mungkin hanya relevan untuk Jawa Tengah saja.

Penelitian ini tidak mencakup wilayah lain atau instansi lain di luar Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam penerapan *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas khususnya dampak yang disebabkan seperti penyakit HIV/AIDS oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui program sekolah percontohan. Pergaulan bebas merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja dan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sekolah, dan masyarakat, *collaborative governance* menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan untuk mengatasi masalah ini melalui kolaborasi dan kerja sama lintas sektoral.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. penelitian ini akan menggali data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait program. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk memahami dinamika, keberhasilan, serta hambatan yang

mungkin dihadapi dalam penerapan *collaborative governance* dalam konteks penanganan pergaulan bebas. Analisis data akan difokuskan pada beberapa aspek kunci dari *collaborative governance*, termasuk dialog tatap muka antarpihak, pembangunan kepercayaan antaraktor, komitmen terhadap proses kolaboratif, pembagian pemahaman tentang isu pergaulan bebas, serta evaluasi terhadap hasil sementara yang telah dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang bagaimana kolaborasi lintas sektoral dapat memengaruhi upaya penanganan pergaulan bebas khususnya dalam upaya penurunan jumlah kasus HIV/AIDS. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja melalui pendekatan *collaborative governance*.

1.9 Metode Penelitian

Sugiyono (2016:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Metode penelitian dapat berfungsi sebagai panduan bagi peneliti, membantu mereka mengarahkan penelitian dengan lebih efektif, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Secara ilmiah, penelitian dilandasi oleh prinsip-prinsip keilmuan, di antaranya adalah rasionalitas, empirisme, dan sistematika. Rasionalitas menunjukkan bahwa penelitian ini berlangsung dengan menggunakan metode-metode yang beralasan sehingga dapat dijelaskan dan dipahami dengan penalaran manusia. Sementara empirisme

mengacu pada pendekatan yang dapat diobservasi dan dimengerti oleh manusia, memungkinkan orang lain untuk mengamati serta memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan. Selain itu, sistematika mencerminkan bahwa proses penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang logis dan teratur. Setiap langkah yang diambil memiliki keterkaitan dan kejelasan yang mengarahkan ke hasil yang ilmiah dan terpercaya.

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa ungkapan lisan atau tertulis dari partisipan, serta perilaku yang dapat diobservasi secara langsung (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2007:4). Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami konteks yang lebih dalam dari fenomena yang diamati dan mendeskripsikan aspek-aspek kualitatif yang mungkin sulit diukur dengan metode kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengikuti alur induktif yang sederhana dalam konteks kualitatif. Alur induktif yang dimaksud dimulai dengan penjelasan atau pencermatan terhadap proses atau peristiwa, yang selanjutnya membawa pada suatu generalisasi yang merupakan kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penanganan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Kota Semarang

1.9.2 Situs Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, situs penelitian terletak di Kota Semarang, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk implementasi *collaborative governance* dalam penanganan pergaulan bebas khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Penelitian ini akan mempelajari berbagai aspek terkait pemberian ilmu mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, seperti program-program yang diimplementasikan, kebijakan yang diadopsi, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor keberhasilan apa saja yang mempengaruhi berjalan nya program kolaborasi tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2016 (halaman 26), subjek penelitian menetapkan batasan subjek penelitian sebagai objek, situasi, atau individu di mana data terkait dengan variabel penelitian melekat dan menjadi fokus permasalahan. Dalam penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang penting karena data terkait variabel tersebut akan diamati oleh peneliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti disebut dengan istilah informan.

Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Jawa Tengah
3. SMP N 22 Semarang

4. SMP N 28 Semarang

5. MTS N 1 Semarang

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data Data Kualitatif yang terdiri dari:

- a. Wawancara: Mendapatkan pandangan dan pengalaman dari anggota PKBI, Dinas Pendidikan, dan generasi muda terkait penanganan pergaulan bebas dan peran *collaborative governance*.
- b. Observasi Lapangan: Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan terkait penanganan pergaulan bebas yang melibatkan PKBI, Dinas Pendidikan, dan generasi muda.
- c. Dokumen Resmi: Menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti kebijakan, program.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri atas dua jenis:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui observasi langsung dan interaksi empiris dengan pelaku atau individu yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian. Data ini kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari Guru- Guru, PKBI dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, tetapi tetap mendukung analisis data. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup artikel, situs web, referensi pustaka, dan jurnal yang berkaitan baik dengan teori maupun data terkait permasalahan dalam penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan terjun langsung ke Sekolah-sekolah di Semarang yang menerapkan program sekolah percontohan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan menghimpun teori dari berbagai sumber terkait. Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga melibatkan pemanfaatan dokumen sebagai sumber informasi. Teknik dokumen ini mencakup pengumpulan data dari referensi yang diperoleh. Penjelasan terkait teknik-teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari individu atau kelompok yang disebut sebagai narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan melibatkan dua pihak, yaitu peneliti sebagai pihak yang mewawancarai dan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik dan terstruktur terkait dengan peristiwa sosial. Observasi ini bertujuan untuk membaca konteks penelitian dan menilai efektivitas dari peristiwa yang diamati.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan barang bukti terkait suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai bukti dan penjelasan terkait peristiwa tersebut karena mencakup gambar dan rekaman suara.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Inilah beberapa langkah untuk menganalisis data seperti yang dijelaskan oleh (Creswell & Susanto, 2013):

- Melakukan pemahaman dan penafsiran data guna proses analisis. Tahapan ini terkait dengan evaluasi hasil wawancara yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengartikan isi, mencatat data yang diperoleh selama observasi, dan mengolah data untuk mengkategorikan sesuai jenisnya.
- Memahami secara menyeluruh data yang terkumpul. Pada langkah kedua ini, tujuannya adalah untuk menyusun rangkuman khusus dari keseluruhan data yang diperoleh.
- Melakukan analisis mendalam melalui pengolahan data.
- Menggunakan hasil pengolahan data untuk tujuan interpretasi.
- Menyajikan hasil interpretasi dari pengolahan data tersebut sebagai laporan kualitatif.

- Menginterpretasikan data. Pada langkah akhir ini, interpretasi bertujuan untuk mempresentasikan data dalam bentuk kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas data oleh penulis adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh William (seperti yang diungkapkan dalam Sugiyono, 2008: 273), adalah proses pemeriksaan data dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda. Tujuan dari pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan bahwa proses dan hasil yang diperoleh dapat dipahami sesuai dengan penafsiran informan. Pendekatan triangulasi ini akan dijalankan dengan langkah-langkah berikut:

- Melakukan wawancara dengan informan
- Menggabungkan hasil wawancara informan dengan isi dokumen terkait
- Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- Membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya